

Dalam Bayang-Bayang Rezim Kebenaran: Analisis Foucauldian atas Wacana Revitalisasi Danau Rawa Pening

Ade Putra Suryana¹, Supratiwi²
Email: adeputrasuryana.045@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai bagian program penyelamatan danau prioritas tidak hanya menghadirkan kebijakan teknis lingkungan, tetapi juga memunculkan kontestasi wacana antara pemerintah dan warga sekitar danau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pembentukan wacana antara pemerintah dan warga dalam revitalisasi Danau Rawa Pening serta mengkaji proses pertarungan wacana yang terjadi di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana Foucauldian dan kerangka Gerakan Sosial Baru. Data untuk mendukung penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah membentuk wacana danau “kritis” melalui legitimasi ilmiah, regulasi, dan otoritas kelembagaan untuk membenarkan revitalisasi, termasuk di dalamnya pengerukan, penertiban tanah, hingga perluasan danau. Pada sisi lain, warga membangun wacana tandingan menggunakan memori kolektif, arsip kepemilikan tanah, kebudayaan, serta pengalaman hidup yang menegaskan hak mereka atas ruang hidup. Proses pertarungan wacana terjadi melalui pembalikan makna, mobilisasi opini publik, dan transformasi perlawanan menjadi Gerakan Sosial Baru. Berdasarkan temuan, rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah mengubah pendekatan teknokratis menuju komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif dengan memperhatikan narasi lokal hingga memori kolektif warga. Untuk warga, direkomendasikan untuk memperkuat konsolidasi identitas kolektif sebagai daya tawar untuk advokasi dengan pemerintah.

Kata kunci: Wacana, Revitalisasi Danau, Gerakan Sosial Baru, Danau Rawa Pening.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The revitalization of Lake Rawa Pening as part of a priority lake rescue program not only presents technical environmental policies, but also gives rise to a contestation of discourse between the government and residents living around the lake. The purpose of this study is to analyze the formation of discourse between the government and residents in the revitalization of Lake Rawa Pening and to examine the process of discourse contestation that occurs between the two. This study uses a qualitative approach with Foucauldian discourse analysis and the New Social Movement framework. Data to support this research was obtained through in-depth interviews, documentation, and field observations. The results of this study show that the government formed a “critical” discourse on the lake through scientific legitimacy, regulation, and institutional authority to justify revitalization, including dredging, land control, and lake expansion. On the other hand, residents construct a counter-discourse using collective memory, land ownership archives, culture, and life experiences that affirm their rights to living space. The process of discourse struggle involves the reversal of meaning, mobilization of public opinion, and the transformation of resistance into an organized New Social Movement. Based on these findings, the recommendation that can be given to the government is to change its technocratic approach to more participatory policy communication by paying attention to local narratives and the collective memory of residents. For residents, it is recommended to strengthen the consolidation of collective identity as bargaining power for advocacy with the government.

Keywords: *Discourse, Lake Revitalization, New Social Movement, Rawa Pening Lake.*

PENDAHULUAN

Kebijakan publik harusnya bermuara pada penciptaan kesejahteraan. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan hal yang sebaliknya. Narasi kesejahteraan kerap kali sekadar dijadikan wacana untuk melanggengkan kebijakan yang belum tentu mensejahterakan. Apabila menempatkan kebijakan di area pertarungan wacana, maka proses ini pada dasarnya adalah perebutan hegemoni antarkelompok. Wacana sendiri, sebagaimana dipahami oleh Junaiyah dan Arifin (2010), merupakan wujud bahasa yang bersifat komunikatif, interpretatif, dan sangat terikat pada konteksnya. Sementara itu, Setiawati dan Rusmawati (2019) menekankan bahwa istilah wacana mencakup segala bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulis

Ilmuan politik yang fokus ke kajian wacana Michel Foucault secara tajam melihat bahwa negara modern tidak lagi banyak menggunakan represi fisik secara telanjang untuk mendisiplinkan warga. Lebih lanjut Foucault dalam karyanya *Discipline and Punish* (1975) menjelaskan bahwa negara menjalankan kekuasaan melalui tiga tahapan: teknologi, strategi, dan program kekuasaan. Kekuasaan muncul bersamaan dengan pengetahuan yang dibungkus dalam disiplin ilmu agar terlihat ilmiah dan tak terbantahkan. Gustomy (2009) menambahkan bahwa praktik kekuasaan ini termanifestasi melalui ide, aturan, hukum, dan istilah-istilah teknis. Ketika pengetahuan yang dibangun melalui wacana ini diterima oleh publik, maka

entitas yang dikuasai akan cenderung menyerahkan hak-hak mereka tanpa disadari.

Praktik operasi kekuasaan melalui wacana ini tampak nyata dalam proyek revitalisasi Danau Rawa Pening di Kabupaten Semarang. Secara geografis dan sosial-ekonomi, danau seluas 2.670 hektar ini menjadi ruang hidup vital bagi warga di empat kecamatan, baik untuk sektor perikanan, pertanian lahan pasang surut, maupun pariwisata. Di balik keindahannya kondisi ekologis Rawa Pening saat ini memprihatinkan. Hal tersebut diakibatkan oleh sedimentasi kronis dan tutupan eceng gondok yang mencapai 70% dari permukaan air. Berangkat dari krisis ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR menetapkan Rawa Pening sebagai salah satu dari 15 danau kritis prioritas penanganan nasional, yang kemudian dilegitimasi secara hukum lewat Keputusan Menteri PUPR No.365/KPTS/M/2020 tentang penetapan patok sempadan.

Melalui instrumen kebijakan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) selaku pelaksana teknis mengonstruksi wacana dominan: revitalisasi adalah cara mutlak guna menyelamatkan danau. Problemnnya mengerucut ketika implementasi kebijakan berupa pematokan batas sempadan tersebut menembus hingga ke pekarangan dan rumah-rumah warga lokal. Alih-alih merasa

diselamatkan, masyarakat justru melihat kebijakan ini sebagai ancaman pengusuran yang berkedok pemekaran danau. Ruang hidup yang sudah puluhan tahun mereka huni diklaim secara sepihak oleh negara demi melancarkan Proyek Strategis Nasional.

Merespons hal tersebut, warga terdampak mulai mengorganisir diri dan membangun wacana tandingan. Masyarakat lokal pada dasarnya tidak anti terhadap upaya perbaikan lingkungan danau, namun mereka menolak keras jika program tersebut merampas hak atas ruang hidup dan mata pencaharian mereka. Resistensi semacam ini merepresentasikan karakter Gerakan Sosial Baru, yakni sebuah aksi kolektif yang tidak lagi eksklusif pada konflik kelas ekonomi, melainkan meluas pada perjuangan mempertahankan eksistensi lingkungan dan identitas dari ancaman struktural. Gerakan sosial muncul sebagai ekspresi kolektif atas isu-isu krusial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat yang semakin heterogen dan modern cenderung lebih terbuka dalam menginisiasi gerakan sosial ketika menghadapi ketimpangan distribusi kebijakan

Beberapa literatur sebelumnya pernah menyentuh fenomena serupa. Kajian Darti dan Herman (2022) menemukan penolakan

warga Kabupaten Wajo terhadap revitalisasi Danau Tempe akibat terancamnya sektor ekonomi lokal. Studi Ardianto (2016) juga menegaskan bahwa janji kesejahteraan dalam suatu kebijakan seringkali sarat muatan politis. Di sisi lain, riset tentang Rawa Pening sejauh ini masih didominasi analisis teknis, seperti kajian sedimentasi oleh Indrayati dan Hikmah (2018). Menyadari masih terbatasnya kajian yang membedah anatomi pertarungan narasi di kawasan tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis proses pembentukan wacana serta perebutan makna antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam dinamika proyek revitalisasi Danau Rawa Pening.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembentukan wacana antara warga sekitar Danau Rawa Pening dengan pemerintah dalam revitalisasi Danau Rawa Pening?
2. Bagaimana proses pertarungan wacana antara warga sekitar Danau Rawa Pening dengan pemerintah?

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan tipe analisis wacana Foucauldian. Tujuannya tidak hanya mencari fakta lapangan, tetapi membongkar konstruksi makna, ideologi, dan kekuasaan

di balik bahasa serta representasi proyek revitalisasi Danau Rawa Pening. Lokasi pengamatan fokus di sekitar kawasan Danau Rawa Pening, BBWS Pemali-Juana, hingga meluas ke ruang media arus utama dan digital, mencakup rentang waktu kejadian 2020-2025.

Penggalian data primer murni mengandalkan observasi langsung dan wawancara mendalam. Subjek yang dilibatkan mencerminkan pihak-pihak yang saling bertarung secara diskursif, yakni warga dan tokoh masyarakat lokal, Kepala Balai BBWS Pemali-Juana, serta Direktur LBH Semarang. Sebagai penopang, data sekunder ditarik dari ragam dokumen resmi, literatur, berita media, hingga konten visual di kanal YouTube yang kerap menjadi arena perebutan wacana.

Pengolahan data berjalan induktif. Peneliti melakukan reduksi untuk mengelompokkan data, menyajikannya, lalu menarik kesimpulan dari pola yang ada. Untuk menjaga kualitas data dari lapangan, triangulasi digunakan guna mengecek silang kebenaran informasi antar sumber. Sehingga data yang ditampilkan nantinya sesuai dan objektif berdasarkan temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konstruksi Wacana Pemerintah

Pemerintah tidak mengawali intervensi di Danau Rawa Pening dengan manuver fisik, melainkan melalui praktik produksi pengetahuan. Dalam kacamata Foucault, kekuasaan negara beroperasi melalui agenda teknologi, strategi, dan program kekuasaan guna memenangkan "kebenaran". Label "Danau Kritis" yang dilekatkan secara formal melalui dokumen GERMADAN tahun 2011 hingga Perpres No. 60/2021 bekerja sebagai formasi objek. Pelabelan ini sengaja dibentuk untuk menghapus identitas historis danau sebagai sumber kehidupan kultural, dan mengubahnya menjadi ancaman bencana ekologis yang mendesak.

Logika kedaruratan ini merupakan fondasi dari strategi diskursif. Sebagaimana dikemukakan oleh Andersen (2003), sebuah strategi dalam analisis wacana selalu melibatkan aturan seleksi wacana untuk menciptakan keberterimaan (*acceptability*) di mata publik. Manipulasi wacana ini pada akhirnya sukses melahirkan apa yang disebut Foucault sebagai *Regime of Truth* (Rezim Kebenaran), di mana intervensi negara berupa revitalisasi besar-besaran dianggap sebagai kebenaran mutlak yang sah.

Untuk melegitimasi *Regime of Truth* tersebut, negara tidak hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga memonopoli

kebenaran saintifik. Menurut Rouse (1994), penguasa menancapkan hegemoninya melalui dua jalan utama: kekuasaan politik dan kekuasaan epistemik. Praktik kekuasaan epistemik ini terlihat jelas ketika pemerintah (BBWS) menggunakan dalih "kajian akademis" serta pelibatan tim ahli lintas instansi sebagai tameng pembenar atas penetapan batas sempadan. Di ranah bahasa, operasi kekuasaan ini bekerja melalui penggunaan kata. Kata represif seperti "penggusuran" disingkirkan, diganti dengan frasa "penertiban" dan penetapan lahan warga sebagai area *status quo* yang tertera pada Kepmen PUPR No. 365/2020. Penggunaan diksi teknis dan netral ini merupakan taktik pendisiplinan untuk membungkus agenda penguasaan ruang agar minim gesekan dan penolakan.

Puncak dari pertarungan diskursif ini adalah materialisasi kekuasaan di lapangan melalui penanaman patok sempadan. Patok beton yang merangsek hingga ke pekarangan rumah warga bukanlah sekadar penanda administratif, melainkan simbol yang secara tajam dijelaskan oleh Foucault (1975) dalam *Discipline and Punish* sebagai instrumen pendisiplinan ruang dan tubuh. Negara memaksa warga untuk mendisiplinkan diri di atas tanahnya sendiri melalui ketakutan dan ketidakpastian. Dimensi represi ini semakin kentara ketika BBWS menggandeng personel militer (TNI

Kodam IV/Diponegoro) dalam proses eksekusi patok. Merujuk pada Foucault (1976) bahwa kekuasaan politik sejatinya adalah perpanjangan dari hubungan perang, kehadiran aparat berseragam di tengah pemukiman sipil berfungsi sebagai alat penertiban simbolik. Praktik ini menelanjangi cara kerja negara modern: menundukkan dan memaksa kepatuhan warga lokal tanpa harus meletupkan kekerasan fisik secara terbuka.

b. Konstruksi Wacana Warga

Operasi kekuasaan selalu memicu lahirnya perlawanan, sebuah antitesis yang tidak berdiri di luar relasi kuasa itu sendiri. Foucault dalam *The History of Sexuality* menegaskan bahwa jika ada kekuasaan maka akan terbit perlawanan dari yang dikuasai. Dalam dinamika Rawa Pening, warga memosisikan diri bukan sebagai objek pasif kebijakan, melainkan aktor yang memproduksi *counter-discourse* atau wacana tandingan guna mendobrak narasi tunggal penguasa. Perlawanan ini bekerja melalui apa yang disebut sebagai kebenaran alternatif; sebuah kondisi di mana pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh institusi formal. Ketika negara menggunakan jalan epistemik lewat lembaga penelitian untuk melegitimasi proyek, warga merespons dengan membangun otoritas pengetahuan mereka sendiri.

Memori kolektif menjadi senjata diskursif utama bagi warga dalam melawan klaim teknokratik yang kerap menganggap ruang hidup mereka sebagai wilayah tak bertuan atau *status quo*. Saat negara memaksakan angka-angka elevasi dan peta satelit, masyarakat menyodorkan bukti historis yang jauh lebih lama.

Keberadaan Candi Dukuh yang berdiri kokoh sejak abad ke-9 seperti yang dikaji mendalam oleh Degroot (2009) adalah bukti fisik otentik bahwa kawasan tersebut merupakan daratan hunian sah jauh sebelum rezim pengetahuan pemerintah mematoknya. Penggunaan arsip tandingan ini menegaskan bahwa tepian Rawa Pening bukan sekadar zona sempadan air, melainkan ruang sakral dengan *bukti sejarah* yang kuat.

Dilihat dari kacamata sosiologis, perlawanan warga Rawa Pening merepresentasikan tipologi Gerakan Sosial Baru yang melintasi batasan konflik kelas tradisional. Rajendra Singh (2010) dalam tesisnya menekankan bahwa gerakan model ini tidak lagi berpusat pada kepentingan material-ekonomi, melainkan pada pembelaan identitas, budaya, serta kedaulatan atas ruang hidup. Isu perlindungan lingkungan dan ekologi menjadi simpul penggerak kolektif yang mempersatukan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang. Warga bahkan

melakukan pembalikan makna secara tajam terhadap bahasa kekuasaan; diksi "penertiban" yang terkesan administratif didekonstruksi secara simbolik menjadi bentuk nyata dari "penggusuran". Pola resistensi yang terorganisir ini membuktikan kemampuan gerakan akar rumput dalam menciptakan arena kontestasi wacana yang setara dengan otoritas negara

c. Analisis Pertarungan Wacana Proyek Revitalisasi Danau Rawa Pening

Dinamika yang terjadi dalam proyek revitalisasi Danau Rawa Pening sejatinya merupakan arena kontestasi antara dua bentuk rasionalitas yang saling bertolak belakang: rasionalitas teknokratik negara melawan rasionalitas historis masyarakat lokal. Pertarungan ini tidak bersifat linier, melainkan beroperasi pada berbagai level, mulai dari produksi teks kebijakan hingga praktik pendisiplinan di lapangan.

Pada dimensi pertama, negara mendominasi ruang publik melalui pembangunan "rezim kebenaran" yang melabeli Rawa Pening sebagai danau "sakit" atau kritis. Pelabelan ini, menurut perspektif Foucauldian, merupakan upaya sistematis untuk memenangkan otoritas epistemik. Dengan membungkus kepentingan proyek dalam bahasa sains yang dianggap objektif, pemerintah mendapatkan legitimasi moral untuk melakukan intervensi fisik yang luas.

Namun, hegemoni pengetahuan tersebut tidak berjalan tanpa retakan. Warga lokal merespons melalui produksi pengetahuan tandingan (*counter-discourse*) yang berakar pada memori kolektif. Di sini terjadi benturan arsip; jika negara menggunakan peta koordinat dan regulasi teknis seperti Kepmen PUPR No. 365/2020, warga menggunakan sertifikat tanah sah, tradisi lisan, dan keberadaan situs sejarah seperti Candi Dukuh sebagai basis klaim mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengetahuan lokal tidak dapat begitu saja disingkirkan oleh narasi kemajuan teknokratis. Warga melakukan pembalikan makna secara tajam, di mana istilah "penertiban" yang terdengar administratif didekonstruksi menjadi makna "penggusuran" yang mengancam kedaulatan ruang hidup.

Pertarungan makna ini pada akhirnya mentransformasi resistensi warga menjadi Gerakan Sosial Baru. Sebagaimana dikonsepsikan oleh Rajendra Singh (2010), gerakan ini tidak lagi sekadar menuntut kompensasi ekonomi, melainkan memperjuangkan hak atas identitas dan eksistensi lingkungan. Dengan membangun jejaring advokasi bersama aktivis, akademisi, dan media arus utama, warga berhasil memindahkan arena pertarungan dari sekadar konflik agraria lokal menjadi diskursus nasional mengenai keadilan

ruang. Walhasil, revitalisasi Rawa Pening menyingkapkan sebuah ironi: narasi penyelamatan ekologis oleh negara justru sering kali menjadi mesin yang meminggirkan entitas sosial yang seharusnya diselamatkan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Revitalisasi Danau Rawa Pening menyingkap sebuah ironi yang tajam: narasi penyelamatan ekologis yang dibawa oleh negara justru bertransformasi menjadi ancaman langsung bagi kedaulatan ruang hidup warga lokal. Dalam praktiknya, pemerintah tidak sekadar melakukan perbaikan lingkungan, melainkan memproduksi wacana "Danau Kritis" sebagai instrumen untuk merebut ruang secara hegemonik.

Sejalan dengan kerangka kekuasaan Foucault, negara sukses membangun sebuah rezim kebenaran melalui pemanfaatan kajian akademis, regulasi teknis, dan mekanisme partisipasi semu. Melalui taktik diskursif ini, agenda perluasan danau serta penertiban pemukiman warga dikonstruksi seolah-olah sebagai sebuah kebenaran obyektif yang tak terbantahkan. Di balik penggunaan bahasa "penyelamatan", beroperasi agenda untuk mengubah danau menjadi episentrum ekonomi dan pariwisata dengan

mengorbankan masyarakat yang secara historis hidup berdampingan dengan perairan tersebut.

Menghadapi rasionalitas teknokratik negara, resistensi masyarakat lokal termanifestasi dalam bentuk pertarungan wacana yang canggih, bukan melalui kekerasan fisik atau kerusuhan. Ketika pemerintah mengandalkan legitimasi angka, peta satelit, dan pengerahan aparat militer untuk mendisiplinkan ruang, warga merespons dengan membangkitkan rasionalitas historis. Mereka menjadikan sertifikat tanah, cerita leluhur, ritual kebudayaan, hingga eksistensi Candi Dukuh sebagai arsip tandingan untuk melawan narasi penguasa.

Pola perlawanan ini secara nyata merepresentasikan karakter Gerakan Sosial Baru (Singh, 2010), di mana warga membangun solidaritas lintas batas, memobilisasi opini publik melalui media, dan menggandeng lembaga bantuan hukum untuk membongkar monopoli wacana pemerintah. Pada akhirnya, dinamika di Rawa Pening membuktikan bahwa proyek revitalisasi ini bukanlah sengketa ekologis semata, melainkan arena kontestasi kuasa yang keras antara ambisi pembangunan negara melawan perjuangan warga dalam mempertahankan kedaulatan atas identitas dan ruang hidupnya.

b. Saran

Bagi Pemerintah

Pendekatan teknokratis dan militeristik dalam mengeksekusi kebijakan proyek strategis harus segera dirombak. Pelaksanaan revitalisasi Danau Rawa Pening mutlak mensyaratkan *meaningful participation* atau partisipasi bermakna, di mana hak warga terdampak untuk didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan diberikan penjelasan benar-benar dipenuhi sebagaimana gagasan Artioko (2022).

Warga lokal tidak boleh sekadar dijadikan objek pelengkap administrasi presensi sosialisasi. Praktik pendisiplinan ruang melalui intimidasi simbolik aparat, yang lekat dengan konsep penguasaan tubuh Foucault (1975) harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya, negara wajib membuka ruang dialog yang setara dan mengakui eksistensi memori serta pengetahuan lokal masyarakat.

Bagi Masyarakat

Menghadapi struktur birokrasi negara yang masif, warga perlu terus memperkuat konsolidasi internal gerakan. Karena perjuangan ini merepresentasikan karakter Gerakan Sosial Baru (Singh, 2010) yang menuntut kedaulatan ruang hidup dan ekologi, maka literasi hukum serta pemahaman kebijakan publik harus terus diasah. Pengetahuan hukum ini krusial

sebagai instrumen negosiasi strategis untuk melawan klaim sepihak penguasa. Hal yang tak kalah urgen adalah mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Mengingat mayoritas tokoh perlawanan saat ini telah berusia lanjut dan proyek revitalisasi merupakan agenda jangka panjang pemerintah, nafas perjuangan lintas generasi harus segera dirawat.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka banyak celah diskursif untuk dieksplorasi. Riset ke depan sangat direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif terkait pola operasi kekuasaan dan pertarungan wacana di 14 danau prioritas nasional lainnya. Di samping itu, penggunaan pendekatan etnografi akan sangat tajam untuk membongkar pengalaman subjektif warga, serta menyoroti dampak sosio-ekonomi jangka panjang akibat pergeseran struktur ruang hidup yang sering kali luput dari kacamata kebijakan makro.

Daftar Pustaka

- Junaiyah, H. M., & Arifin, E. Z. (2010). Keutuhan wacana. Grasindo.
- Setiawati, E., & Rusmawati, R. (2019). Analisis wacana: konsep, teori, dan aplikasi. Universitas Brawijaya Press.
- Foucault, M. (1978). The history of sexuality: An introduction (Vol. 1). (R. Hurley, Trans.). Pantheon Books. (Original work published 1976).
- Foucault, M. (1975). Discipline and punish. A. Sheridan, Tr., Paris, FR, Gallimard
- Gustomy, R. (2009). Negara Menata Ummat. Yogyakarta: Reaserch Center for Politics and Government.
- Darti, B. S., & Herman, S. R. W. (2022). Dilema Kebijakan Revitalisasi Pemanfaatan Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Politics and Humanism*, 1(1), 1-9.
- Ardianto, H. T. (2016). Mitos tambang untuk kesejahteraan: pertarungan wacana kesejahteraan dalam kebijakan pertambangan. Penerbit PolGov.
- Indrayati, A., & Hikmah, N. I. (2018). Prediksi sedimen Danau Rawa Pening tahun 2020 sebagai dasar reservasi Sungai Tuntang berbasis sistem informasi geografis. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018*.
- Andersen, N. (2003). Discursive analytical strategies: Understanding Foucault, Kossleck, Laclau, Luhmann. Policy Press.
- Rouse, J. (1994). Power/knowledge. *The cambridge companion to Foucault*, 2, 1- 192.
- Degroot, V. (2009). Candi, space and landscape: a study on the distribution, orientation and spatial organization of Central Javanese temple remains (No. 38). Sidestone press.
- Singh, Rajendra. (2010). Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book.
- Artioko, F. R. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 69.